



# 2021

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**



Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2  
Magelang 56101



(0293) 363645



[inspektoratmglkota@yahoo.com](mailto:inspektoratmglkota@yahoo.com)

## Kata Pengantar

**D**alam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Daerah Kota Magelang telah menyusun LKjIP Tahun 2021 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Magelang, 19 Januari 2022  
Inspektur Daerah Kota Magelang



**DEDDY EKO SUMARWANTO, ST**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Inspektorat Kota Magelang

2021

i

## *Ikhtisar Eksekutif*

**I**nspektorat Daerah Kota Magelang sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kota Magelang dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kota Magelang secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat Daerah Kota Magelang menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kota Magelang **“Magelang Sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”** melalui misi ke satu (1) yaitu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-government* dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Magelang, Inspektorat Daerah Kota Magelang menetapkan 3 sasaran strategis beserta (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah dengan indikator Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan pengendalian Internal dengan indikator Penilaian Maturitas SPIP;
3. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan indikator Level Kapabilitas APIP.

Permasalahan/kendala dalam pencapaian sasaran antara lain;

1. Masih kurangnya komitmen entitas terperiksa untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal;
2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
3. Belum maksimalnya fungsi SPIP di setiap OPD untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing OPD;
4. Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS Online);
5. Kegiatan pengawasan mandatory yang sering muncul diluar Program kerja pengawasan tahunan yang telah disusun;
6. Masih kurangnya jumlah pegawai secara kualitas maupun kuantitas khususnya Auditor di Inspektorat Daerah Kota Magelang.

Adapun Strategi/upaya pemecahan masalah adalah meningkatkan peran APIP sebagai sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partners* untuk menunjang mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan aspiratif serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat; membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk meningkatkan sistem pelaporan dan capaian kinerja pengawasan dan keuangan; mengoptimalkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk meningkatkan kapabilitas (APIP) Inspektorat Daerah Kota Magelang.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	ii
<b>Daftar Isi</b>	iv
<b>Daftar Tabel</b>	v
<b>Daftar Gambar</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	7
D. Landasan Hukum	8
E. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	44
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
<b>BAB IV PENUTUP</b>	53
<b>LAMPIRAN</b>	56

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan	5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang Menurut Golongan	5
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang Menurut Jenjang Pendidikan dan Gender	6
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Daerah Kota Magelang	6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang	15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Magelang	16
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Magelang	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	18
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	19
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	20
Tabel 2.7 Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	20
Tabel 2.8 Ringkasan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	20
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Daerah Kota Magelang	23
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	24
Tabel 3.3 Hasil Perbandingan Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021	24
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	25
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	25
Tabel 3.6 Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang	26
Tabel 3.7 Capaian sasaran strategis 2 Inspektorat Daerah Kota Magelang	28
Tabel 3.8 Hasil Penilaian SPIP	29
Tabel 3.9 Capaian sasaran strategis 3 Inspektorat Daerah Kota Magelang	30
Tabel 3.10 Hasil QA Kapabilitas APIP	30
Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	31

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kota Magelang	32
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Eselon III Inspektorat Daerah Tahun 2021	38
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Eselon IV Inspektorat Daerah Tahun 2021	39
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	39
Tabel 3.16 Hasil Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 dan 2020	43
Tabel 3.17 Laporan Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021	45
Tabel 3.18 Laporan Realisasi Belanja Langsung Per Program Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021	47
Tabel 3.19 Perbandingan Anggaran TA 2020 dan 2021	48
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	48
Tabel 3.21 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	50
Tabel 3.22 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	50

## *Daftar Gambar*

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Magelang	4
Gambar 2.1 Penentuan sasaran dari RPJMD	15
Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Magelang	27
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang	38

# BAB I

## *Pendahuluan*

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Daerah Kota Magelang selaku Perangkat Daerah unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di tetapkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kota Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat;

4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

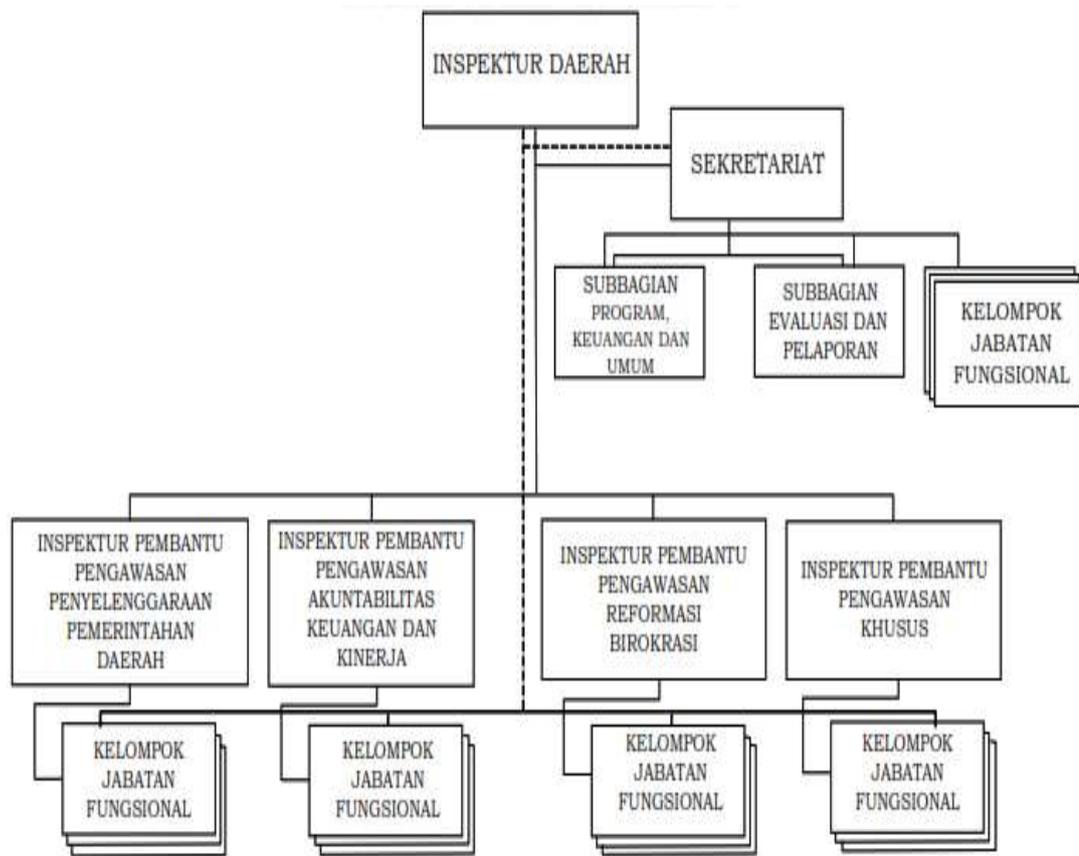
Disamping fungsi pencegahan, dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi penindakan tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah. Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan yaitu Inspektorat Daerah Kota Magelang sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Magelang. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang di pimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 1.1

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG



Sumber: Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang

Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kota Magelang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung sebagai berikut;

Tabel 1.1

## Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang

## Menurut Jabatan

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Total</b>
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III		5	5
3	Eselon IV		2	2
4	Fungsional P2UP			7
		Pengawas Pemerintahan Muda	3	
		Pengawas Pemerintahan Madya	4	
5	Fungsional Auditor			8
		Auditor Terampil	1	
		Auditor Pertama	1	
		Auditor Penyelia	1	
		Auditor Muda	2	
		Auditor Madya	3	
6	Calon Auditor		2	2
7	Pelaksana			5
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>30</b>

Tabel 1.2

## Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang Menurut Golongan

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Wanita</b>	<b>Jumlah</b>
1	Golongan IVc	1	-	1
2	Golongan IVb	3	6	9
3	Golongan IVa	-	3	3
4	Golongan III d	5	2	7
5	Golongan III c	-	1	1
6	Golongan III b	-	4	4
7	Golongan III a	2	1	3
8	Golongan II d	-	-	-
9	Golongan II c	-	1	1
10	Golongan II b	-	-	-
11	Golongan II a	1	-	1
	<b>JUMLAH</b>	12	18	30

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Magelang  
Menurut Jenjang Pendidikan dan Gender

No	Pendidikan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Magister/S-2	3	6	9
2	Sarjana/S-1	7	10	17
3	Sarjana Muda/DIII	1	-	2
4	SLTA	-	2	2
5	SLTP	1	-	1
	JUMLAH	12	18	30

Sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut;

Tabel 1.4  
Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Daerah  
Kota Magelang

No	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Nilai (Rp)
1	<b>TANAH</b>	-	-
2	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>387</b>	<b>3.808.740.729</b>
	a. Alat-alat besar	4	231.454.000
	b. Alat-alat angkutan	22	1.676.290.750
	c. Alat-alat bengkel dan ukur	5	8.276.500
	d. Alat-alat pertanian/peternakan	-	-
	e. Alat-alat kantor dan rumah tangga	258	1.099.338.019
	f. Alat-alat studio dan komunikasi	2	5.274.580
	g. Alat-alat kedokteran	1	750.000
	h. Alat-alat laboratorium	1	18.408.000
	i. Alat-alat komputer	95	768.948.880
3	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>4</b>	<b>6.991.873.317</b>
	a. Bangunan dan Gedung	4	6.991.873.317
	b. Monumen	-	-
4	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1</b>	<b>63.231.092</b>
	a. Jalan dan jembatan	-	-
	b. Bangunan Air/Irigasi	-	-
	c. Instalasi	1	63.231.092
	d. Jaringan	-	-
5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>48</b>	<b>18.830.500</b>
	a. Buku perpustakaan	27	5.645.500
	b. Barang bercorak Kesenian/kebudayaan	-	-
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	21	13.185.000
6	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>440</b>	<b>10.882.675.638</b>

### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Peran Inspektorat Daerah adalah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian “Intern” Pemerintah.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, APIP mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
4. Adanya komitmen pemimpin daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
5. Penguatan pengawasan sebagai bagian dari area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 80

Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010–2025.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kota Magelang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partners* belum optimal;
2. Kebijakan (baik bersifat pencegahan maupun penindakan) Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum efektif;
3. Kurangnya aparatur fungsional pengawas baik dari kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP dengan adanya perubahan paradigma APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partners*;
2. Kurang optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kota Magelang.

#### D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  6. Peraturan Walikota MAgelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021;
  7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2021 adalah :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

**BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV    PENUTUP**

## BAB II

# *Perencanaan Kinerja*

### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Magelang. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Kota Magelang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Magelang. Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah:

**“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**

### **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan

dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

“Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

Tujuan:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan aparatur yang berkualitas dan profesional
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif
- 3) Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang efisien

- 4) Mewujudkan kemampuan partisipasi masyarakat
- 5) Mewujudkan prestasi pemuda dan olahraga

Sasaran :

- 1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, disiplin dan memenuhi standar kompetensi
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City
- 5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
- 6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 7) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 8) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemuda berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional.

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Magelang yaitu “MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS” serta Misi Pertama Pemerintah Kota Magelang untuk “Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan aspiratif serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat”, Inspektorat Daerah Kota Magelang mempunyai komitmen untuk mendukung tujuan pertama yaitu meningkatnya kinerja dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan aparatur yang berkualitas dan professional.

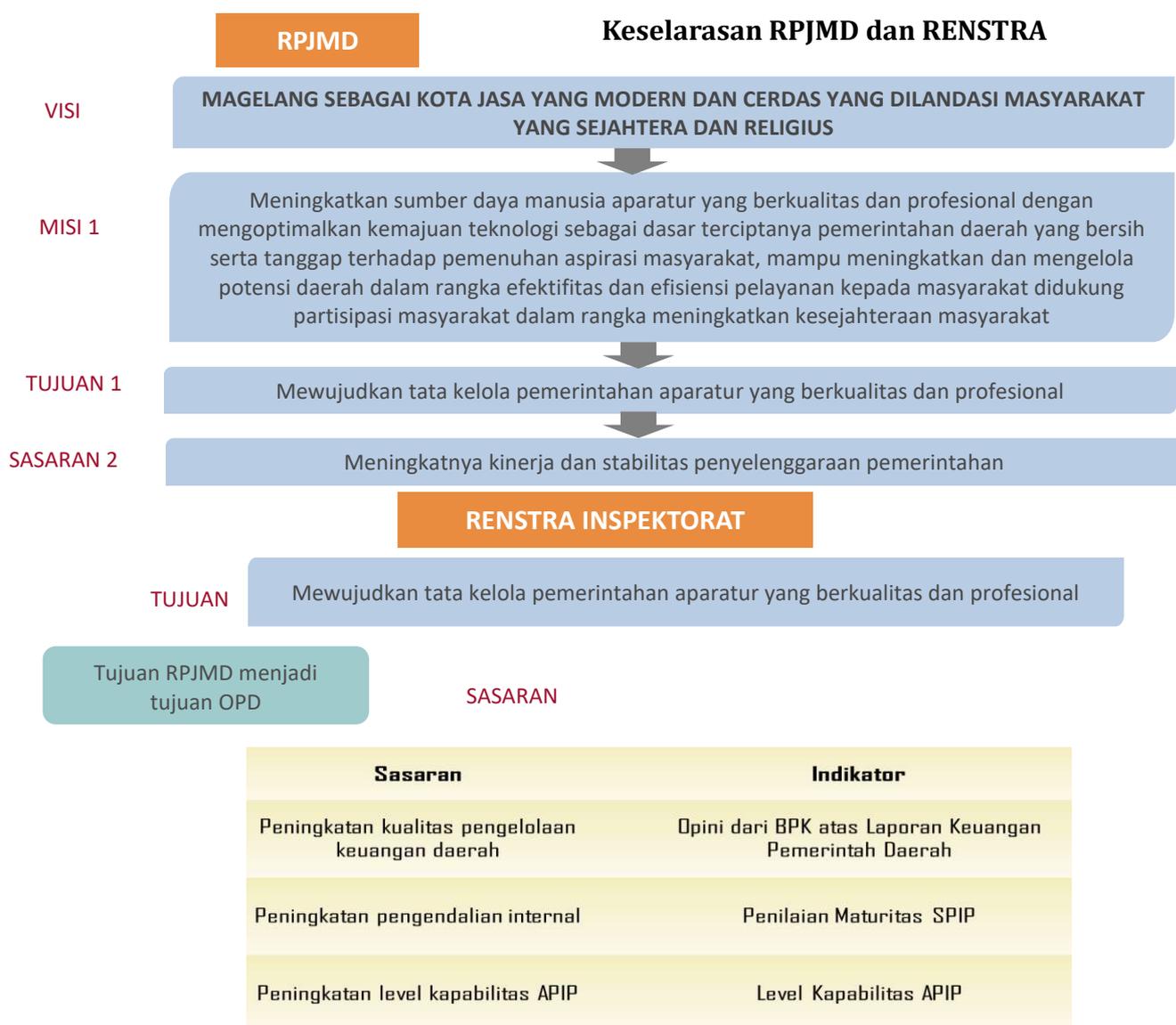
Untuk mewujudkan tujuan dalam RPJMD yang menjadi tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan aparatur yang berkualitas dan professional”, ditetapkan 3 sasaran utama yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- 2) Peningkatan pengendalian internal
- 3) Peningkatan level kapabilitas APIP

Penentuan sasaran renstra berdasarkan sasaran RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 2.1

Penentuan sasaran dari RPJMD



Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
Inspektorat Daerah Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan aparatur yang berkualitas dan profesional	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
		Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	2	3	3,5	3,5	3,5
		Peningkatan level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kota Magelang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Suplemen Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Penilaian Maturitas SPIP;
- 3) Level Kapabilitas APIP.

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Inspektorat Daerah Kota Magelang

NO	TUJUAN/SARAN STRATEGIS	INDIKATOR OR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas LKPD	Opini	Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, instansi pemerintah memiliki indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berupa predikat opini tertinggi dari lembaga auditor eksternal (dalam hal ini BPK) berupa opini WTP	Opini BPK atas Pemeriksaan LKPD	BPK
2	Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	Angka	Salah satu target indikator kinerja bidang aparatur negara adalah tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturasi SPIP dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 (pada tahun 2019)	Penilaian BPKP atas Maturitas SPIP	BPKP
3	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Angka	Peningkatan kapabilitas APIP merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi target RPJMN 2014-2019, dimana APIP harus telah mencapai Level 3 dari 5 Level IACM yang diterbitkan oleh IIA	Penilaian BPKP atas Level Kapabilitas APIP	BPKP

## B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 termuat di dalam dokumen Renja

Perangkat Daerah Tahun 2021. Berikut Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 :

Tabel 2.3  
Rencana Kinerja Tahun 2021  
Inspektorat Daerah Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan aparatur yang berkualitas dan profesional	1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas LKPD	Opini	WTP
		2	Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	Angka	3,5
		3	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Angka	3

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Inspektorat Daerah Kota Magelang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai komitmen untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Magelang.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan acuan dari Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah. Pada Pertengahan Tahun 2021, Inspektorat Daerah melakukan perubahan terhadap perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran serta adanya perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Kota Magelang.

Adapun hasil Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2021

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Opini dari BPK atas LKPD	Opini	WTP
2	Peningkatan pengendalian internal	1 Penilaian Maturitas SPIP	Angka	3,5
3	Peningkatan level kapabilitas APIP	1 Level Kapabilitas APIP	Angka	3

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang :

Tabel 2.5

## Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	100%	Rp 5.906.740.000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	100%	Rp 186.785.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	100%	Rp 404.096.000
				<b>Rp 6.497.621.000</b>

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 13 Oktober 2021, dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dikarenakan terjadi perubahan anggaran dan pada tanggal 26 November 2021 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dikarenakan terjadi pergantian pejabat (namun tidak mengubah indikator serta anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Perubahan Perjanjian Inspektorat Daerah Kota Magelang  
Tahun 2021

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Opini dari BPK atas LKPD	Opini	WTP
2	Peningkatan pengendalian internal	1 Penilaian Maturitas SPIP	Angka	3,5
3	Peningkatan level kapabilitas APIP	1 Level Kapabilitas APIP	Angka	3

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang :

Tabel 2.7  
Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang  
Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	100%	Rp 6.353.999.122
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	100%	Rp 178.485.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	100%	Rp 314.906.000
				<b>Rp 6.847.390.122</b>

Tabel 2.8  
Ringkasan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021

URAIAN	DPA (Rp)	DPPA (Rp)
<b>Belanja Pegawai</b>	Rp 5.327.621.000	Rp 5.769.880.122
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	Rp 1.170.000.000	Rp 1.077.510.000
<b>Belanja Operasi</b>	Rp 6.497.621.000	Rp 6.847.390.122

Pada awal tahun 2021, Inspektorat Daerah merencanakan anggaran sebesar Rp6.497.621.000,00 , namun melalui mekanisme perubahan APBD, total alokasi anggaran yang dianggarkan untuk mencapai sasaran strategis pada perubahan perjanjian kinerja 2021 Inspektorat Kota Magelang adalah sebesar Rp6.847.390.122,00 (mendukung 3 program dengan 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan).

## BAB III

# Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut berdasarkan acuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017:

- 91 s/d 100 : Sangat Baik
- 76 s/d <90 : Tinggi
- 66 s/d <75 : Sedang
- 51 s/d <65 : Rendah
- 0 s/d <50 : Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah dengan mengukur capaian antara target kinerja dan realisasi kinerja Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	TUJUAN/ SASARAN	Indikator Kinerja	Satuan	2021				
				Target	Realisasi	Sumber Data	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	BPK	100%	Sangat Baik
2.	Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	BPKP	87%	Tinggi
3.	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	BPKP	100%	Sangat Baik
RATA-RATA CAPAIAN							96%	

Hasil capaian rata-rata pengukuran indikator kinerja utama tahun 2021 adalah sebesar 96%.

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang  
Tahun 2021

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	PERSENT ASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENT ASE CAPAIAN
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
2	Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	3,5	3,038	87%	3,5	3,038	87%
3	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	3	3	100%

Tabel 3.3  
Hasil Perbandingan Capaian kinerja  
dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	1,163	3,08	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)
3.	Level Kapabilitas APIP	Level	1	3 dengan catatan	3 dengan catatan	3	3	3

Perbandingan capaian kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota  
Magelang Tahun 2021

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	TARGET AKHIR 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%
2	Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	3,038	3,5	87%
3	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional  
Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	STANDAR NASIONAL	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%
2	Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	3,038	3	101%
3	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, instansi pemerintah memiliki indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berupa predikat opini tertinggi dari lembaga auditor eksternal (dalam hal ini BPK) berupa opini WTP dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, dan meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan Negara.

Salah satu target indikator kinerja bidang aparatur negara adalah tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturasi SPIP dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 (pada tahun 2019). Pengukuran tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP ini bukan sekedar pencapaian target kinerja, tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk indikator Level Kapabilitas APIP, Peningkatan kapabilitas APIP merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi target RPJMN 2014-2019, dimana APIP harus telah mencapai Level 3 dari 5 Level IACM.

Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja untuk tahun 2021, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1 :**

**“Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah “**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat *sangat baik*.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
1.	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100%

Gambar 3.1

## Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Magelang



Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD TA 2020 adalah jumlah keseluruhan 12 temuan yang terdiri dari 25 rekomendasi, masih ada 8 rekomendasi yang belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut. Oleh karena itu perlu upaya secara signifikan untuk mempertahankan pencapaian opini WTP ini.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 1 adalah;

1. OPD/obrik masih kurang memahami untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan;
2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan.
3. Adanya pihak ketiga / instansi vertikal dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan:

1. Mengoptimalkan perbaikan perencanaan dengan melakukan cascade down agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil

pemeriksaan

3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang.
4. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertikal dan pemberi rekomendasi.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1, didukung oleh pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 86,84% dari total pagu.

**Sasaran 2 :**

**“Peningkatan pengendalian Internal “**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan pengendalian internal dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 88% dengan predikat *tinggi*. Sasaran ini masih menggunakan hasil evaluasi SPIP tahun 2017, karena Inspektorat Daerah Kota Magelang tidak mendapatkan evaluasi SPIP dari BPKP, sehingga masih menggunakan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tahun 2017.

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian sasaran strategis 2 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
2.	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	88%

Kesimpulan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Magelang adalah Level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,038 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Hasil Penilaian SPIP

No	Unsur-unsur SPIP	Hasil Penilaian		
		Nilai	Bobot	Skor
1	Lingkungan Pengendalian	3,000	30,00%	0,938
2	Penilaian Resiko	3,000	20,00%	0,600
3	Kegiatan Pengendalian	3,000	25,00%	0,750
4	Informasi dan Komunikasi	3,000	10,00%	0,300
5	Pemantauan	3,000	15,00%	0,450
		3,000	100,00%	3,038

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Magelang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar resiko dan rencana tindak pengendalian pada semua OPD;
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan dan implementasi serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi tersebut;
- 3) Menyelenggarakan penyelenggaraan SPIP dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 2 adalah;

1. Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal;
2. Dokumen SOP belum memadai
3. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2, didukung oleh pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan dengan realisasi sumber daya

keuangan sebesar 86,84% dari total pagu.

### Sasaran 3 :

#### “Peningkatan Kapabilitas APIP “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan kapabilitas APIP dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat *Sangat Baik*. Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian sasaran strategis 3 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
3.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Dari hasil *Quality Assurance* menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Magelang telah berada pada Level 3 untuk semua elemen sebagai berikut:

Tabel 3.10

Hasil QA Kapabilitas APIP

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3	Praktik profesional	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Magelang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kematangan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas pengelolaan resiko pemerintah daerah;

2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan *Key Process Area* (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi;
3. Melakukan *Self Assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 3 adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas APIP yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas masih tergolong rendah. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi fungsional pengawas, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), serta menambah jumlah pegawai pada Inspektorat Kota Magelang dengan penerimaan CPNS maupun mutasi pegawai.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3, didukung oleh pelaksanaan Program Pendampingan dan Asistensi dengan realisasi keuangan sebesar 96,79%.

Tabel 3.11

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPD/obrik masih kurang memahami untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan;</li> <li>2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan.</li> <li>3. Adanya pihak ketiga / instansi vertikal dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan perbaikan perencanaan dengan melakukan cascade down agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan</li> <li>3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang.</li> <li>4. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertikal dan pemberi rekomendasi.</li> </ol>

2	Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	3,5	3,038	87%	1. Satgas SPIP pada DPD belum berfungsi secara maksimal; 2. Dokumen SOP belum memadai 3. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik	mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
3	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas	1. Mendorong peningkatan kematangan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas pengelolaan risiko pemerintah daerah; 2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi; 3. Melakukan Self Assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3. 4. menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi fungsional pengawas, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), serta menambah jumlah pegawai pada Inspektorat Kota Magelang dengan penerimaan CPNS maupun mutasi pegawai.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang, telah dirumuskan tujuh (3) program dengan indikator keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan serta hasil evaluasi rencana aksi program sebagai berikut:

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kota Magelang

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	%	100	100
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	100
<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	Peningkatan fungsi APIP sebagai consulting partner dan quality assurance	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100	100

1. Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dengan indikator pencapaian sasaran Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran hasil

tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Renja dan Renstra OPD sebanyak 3 dokumen.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya RKA OPD sebanyak 1 dokumen.
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Dokumen DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Capaian kinerja OPD dan LKJiP OPD sebanyak 5 laporan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 12 bulan.
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan OPD sejumlah 12 laporan.
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya

Laporan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan.

- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan prognosis SKPD sebanyak 1 laporan.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan PAK sebanyak 2 dokumen.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya bahan logistik kantor selama 12 bulan.
  - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.
  - 4) Penyediaan Bahan/Material dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya kebersihan kantor selama 12 bulan.
  - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator pencapaian sasaran penyediaan fasilitasi kunjungan tamu selama 12 bulan.
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya penyelenggaraan rakor dan konsultasi selama 12 bulan.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator pencapaian sasaran adalah terpenuhinya kegiatan administrasi surat menyurat perkantoran selama 12 bulan.
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya kendaraan dinas jabatan sebanyak 7 unit.
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya kendaraan dinas operasional sebanyak 15 unit.
  - 3) Pemeliharaan Mebel dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya mebeleur sebanyak 6 unit.
  - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya peralatan dan mesin sebanyak 34 unit.
  - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 unit.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

2. Sasaran Program Penyelenggaraan pengawasan adalah meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan dengan indikator pencapaian sasaran persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan

yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 2 Laporan.
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 1 Laporan.
- 3) Reviu Laporan Kinerja dengan indikator pencapaian sasaran tersusunya Laporan Reviu Laporan Kinerja sebanyak 2 Laporan.
- 4) Reviu Laporan Keuangan dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Reviu Laporan Keuangan sebanyak 3 Laporan.
- 5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 2 Laporan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan penanganan penyelesaian kerugian daerah sejumlah 1 laporan.
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan pengawasan dengan tujuan tertentu sejumlah 1 laporan.

Program Penyelenggaraan pengawasan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

3. Sasaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan

Asistensi adalah peningkatan fungsi APIP sebagai consulting partner dan quality assurance dengan indikator pencapaian sasaran Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya sisdur dan kebijakan pengawasan sejumlah 1 dokumen.
- b. Pendampingan dan Asistensi
  - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan pendampingan dan asistensi urusan pemda sejumlah 1 laporan.
  - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi sejumlah 3 laporan.
  - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sejumlah 5 laporan.
  - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sejumlah 1 laporan.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama

OPD.

Dalam implementasi perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Inspektorat Daerah telah berupaya untuk dapat menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan menyusun pohon kinerja dan membangun komitmen dari kepala hingga staf dimana skema pohon kinerja adalah mencari atau menentukan akar permasalahan, kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Berikut ini adalah skema pohon kinerja Inspektorat Kota Magelang;

Gambar 3.2

Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang



Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Eselon III Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun an	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat							

1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	%	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	100	100	100
3	Peningkatan fungsi APIP sebagai consulting partner dan quality assurance	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100	100	100	100

Tabel 3.14

Capaian Indikator Kinerja Eselon IV Inspektorat Daerah  
Kota Magelang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun an	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor.	%	100	100	100	100
2	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
3	Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	88	88	95,06	100
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	95	95	100	100

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang  
Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERS EN T ASE CAP AIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERS EN T ASE CAP AIAN	MENUNJ ANG/TID AK MENUNJ ANG
Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini dari BPK atas LKPD	100%				
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas LKPD	100%				
Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	88				

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	100%	Menunjang
			<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan	100%	Menunjang
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang dilaksanakan	100%	Menunjang
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	100%	Menunjang
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	100%	Menunjang
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	100%	Menunjang
			<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tepat waktu	100%	Menunjang
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	100%	Menunjang
<b>Peningkatan level kapabilitas APIP</b>	Level Kapabilitas APIP	100%				
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	100%	Menunjang
			<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan dan tepat waktu	100%	Menunjang
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dihasilkan	100%	Menunjang
			<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnyameningkat	100%	Menunjang
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi	100%	Menunjang
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%	Menunjang
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	100%	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	100%	Tidak Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	100%	Tidak Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Tidak Menunjang

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan DPD	100%	Tidak Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun	100%	Tidak Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	Tidak Menunjang
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan PAK	100%	Tidak Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan bahan logistik kantor	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	100%	Tidak Menunjang
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	100%	Tidak Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	Tidak Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor.	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang

Inspektorat Daerah Kota Magelang mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang meliputi:

### 1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 atas kinerja

tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun jumlah Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah 29 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dengan nilai rata-rata 71,48 (BB).

## **2. Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Selama Tahun 2021, Inspektorat Daerah Kota Magelang telah menerima penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus/kasus dengan berbagai macam substansi pengaduan diantaranya Potensi Kerugian daerah, Indikasi Korupsi ataupun Indisipliner.

## **3. Evaluasi Reformasi Birokrasi**

Merupakan salah satu alat untuk mengukur perkembangan Reformasi Birokrasi disuatu daerah berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB-RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun penilaiannya menggunakan perbandingan Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-Undangan, Penataan & Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dibandingkan dengan Nilai Komponen Hasil (Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan Kualitas Pelayanan Publik). Berdasarkan hasil review Tim Penilai Nasional atas pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, Pemerintah Kota Magelang memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 66,50 (Baik) kategori “B” dan pada tahun 2020 dengan 12 OPD sampling. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik.

Tabel 3.16

Hasil Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi  
Tahun 2019 dan 2020

No	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai
			2019
<b>I</b>	<b>KOMPONEN PENGUNGKIT</b>		
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,56
2	Penataan Peraturan perundang-undangan	5,00	2,15
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,83
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,45
5	Penataan Sistem manajemen SDM	15,00	11,42
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,71
7	Penguatan Pengawasan	12,00	4,93
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,81
	<b>TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT</b>	<b>60,00</b>	<b>34,86</b>
<b>B</b>	<b>KOMPONEN HASIL</b>		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,11
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,92
4	Opini BPK	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,45
	<b>TOTAL KOMPONEN HASIL</b>	<b>40,00</b>	<b>31,47</b>
	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>100,00</b>	<b>66,33</b>
No	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai
			2020
<b>I</b>	<b>KOMPONEN PENGUNGKIT</b>		
1	Pemenuhan	20,00	13,39
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,61
3	Reform	30,00	15,57
	<b>TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT</b>	<b>60,00</b>	<b>35,11</b>
<b>B</b>	<b>KOMPONEN HASIL</b>		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,65
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,45
3	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	8,45
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,48
	<b>TOTAL KOMPONEN HASIL</b>	<b>40,00</b>	<b>31,39</b>
	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>100,00</b>	<b>66,50</b>

#### **4. Pemberian *reward and punishment* melalui pemilihan APIP berprestasi**

Teknik Penilaian ASN berprestasi menggunakan metode penilaian 360<sup>o</sup> melalui survey elektronik, dimana kinerja pegawai dinilai berdasarkan umpan balik dari setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengannya baik oleh atasan, rekan kerja, mitra, anak buah, maupun pelanggan. ASN yang memperoleh nilai tertinggi diberikan *reward* berupa piagam penghargaan, uang, diumumkan pada *website* serta papan pengumuman serta diajukan dalam Employee of The Month tingkat Kota. APIP berprestasi juga diberikan kesempatan untuk pengembangan diri melalui penugasan dan diklat.

#### **5. Tindak Lanjut atas MCP Korsupgah**

Program KPK dan kegiatan Korsupgah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Adapun fokus secara umum terdiri atas Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen BMD dan Sektor Strategis. Untuk Nilai MCP Kota Magelang, hasil verifikasi oleh Tim Korwil VII Korsupgah KPK atas ketujuh indikator program MCP Korsupgah Tahun 2021 adalah 87,00.

### **B. Realisasi Anggaran**

Aspek keuangan sebagai unsur penunjang dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021. Adapun perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17

Laporan Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Daerah  
Kota Magelang Tahun Anggaran 2021

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>6.01.0.00.0.00.24</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>6.847.390.122</b>	<b>5.608.477.812</b>	<b>81,91%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
1	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
2	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
3	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	1.994.000	99,70%	100,00%	100,00%
4	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
5	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
6	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.575.000	3.555.000	99,44%	100,00%	100,00%
	<b>6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
7	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.02 . 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.769.880.122	4.691.888.681	81,32%	100,00%	100,00%
8	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.02 . 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.460.000	6.417.500	99,34%	100,00%	100,00%
9	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.02 . 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.950.150	97,51%	100,00%	100,00%
10	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.02 . 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	1.961.000	98,05%	100,00%	100,00%
	<b>6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
11	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.05 . 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.602.000	4.362.900	94,80%	100,00%	100,00%
	<b>6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
12	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24	Penyediaan Komponen Instalasi	9.747.000	7.973.000	81,80%	100,00%	100,00%

	. 1 . 2.06 . 1	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
13	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.680.000	13.271.375	84,64%	100,00%	100,00%
14	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.724.000	17.116.000	96,57%	100,00%	100,00%
15	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 7	Penyediaan Bahan/Material	9.452.000	9.275.550	98,13%	100,00%	100,00%
16	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.080.000	19.072.622	99,96%	100,00%	100,00%
17	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.324.000	62.549.577	83,04%	100,00%	100,00%
	<b>6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
18	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.08 . 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.467.000	12.435.900	99,75%	100,00%	100,00%
19	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.08 . 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.200.000	87.695.825	72,36%	100,00%	100,00%
20	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.08 . 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.948.000	69.550.062	99,43%	100,00%	100,00%
	<b>6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
21	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09 . 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.425.000	41.895.348	63,07%	100,00%	100,00%
22	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09 . 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.770.000	45.461.734	49,54%	100,00%	100,00%
23	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09 . 5	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	5.982.000	99,70%	100,00%	100,00%
24	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09 . 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.665.000	29.564.000	99,66%	100,00%	100,00%
25	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09 . 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000	6.714.000	61,04%	100,00%	100,00%
	<b>6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>					
26	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	44.600.000	38.974.610	87,39%	100,00%	100,00%
27	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9.100.000	6.302.000	69,25%	100,00%	100,00%

28	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 3	Reviu Laporan Kinerja	7.000.000	6.851.500	97,88%	100,00%	100,00%
29	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 4	Reviu Laporan Keuangan	25.000.000	21.049.750	84,20%	100,00%	100,00%
30	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	67.785.000	60.278.314	88,93%	100,00%	100,00%
	<b>6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>					
31	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.02 . 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15.000.000	13.023.000	86,82%	100,00%	100,00%
32	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.02 . 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10.000.000	8.510.226	85,10%	100,00%	100,00%
	<b>6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>					
33	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.01 . 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.000.000	4.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>					
34	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.02 . 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000	2.557.000	85,23%	100,00%	100,00%
35	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.02 . 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	71.377.000	66.478.688	93,14%	100,00%	100,00%
36	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.02 . 3	Koordinasi, Monitoring Verifikasi Pencegahan dan tupsi	225.769.000	222.903.000	98,73%	100,00%	100,00%
37	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.02 . 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10.760.000	8.863.500	82,37%	100,00%	100,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>6.847.390.122</b>	<b>5.608.477.812</b>	<b>81,91%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tabel 3.18

Laporan Realisasi Belanja Langsung Per Program  
Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021

INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	6.353.999.122	5.148.686.224	81,03%	18,97%
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	178.485.000	154.989.400	86,84%	13,16%
<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	314.906.000	304.802.188	96,79%	3,21%
	6.847.390.122	5.608.477.812	81,91%	18,09%

Tabel 3.19  
Perbandingan Anggaran TA 2020 dan 2021

Tahun	2020	2021
<b>Jumlah program dan kegiatan</b>	4 program 25 kegiatan	3 program 10 kegiatan 37 sub kegiatan
<b>Alokasi Anggaran untuk kegiatan pengawasan</b>	Rp 1.761.108.000	Rp 493.391.000

Penambahan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 3.20  
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja	
			Vol	Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<b>6.353.999.122</b>	<b>5.148.686.224</b>		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>13.575.000</b>	<b>13.549.000</b>		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	3	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	1.994.000	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.575.000	3.555.000	5	Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>5.780.340.122</b>	<b>4.702.217.331</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.769.880.122	4.691.888.681	12	Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.460.000	6.417.500	12	Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.950.150	1	Laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	1.961.000	1	Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>4.602.000</b>	<b>4.362.900</b>		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.602.000	4.362.900	2	Dokumen

Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>147.007.000</b>	<b>129.258.124</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.747.000	7.973.000	12	Bulan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.680.000	13.271.375	12	Bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.724.000	17.116.000	12	Bulan
	Penyediaan Bahan/Material	9.452.000	9.275.550	12	Bulan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.080.000	19.072.622	12	Bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.324.000	62.549.577	12	Bulan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>203.615.000</b>	<b>169.681.787</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.467.000	12.435.900	12	Bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.200.000	87.695.825	12	Bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.948.000	69.550.062	12	Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>204.860.000</b>	<b>129.617.082</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.425.000	41.895.348	7	Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.770.000	45.461.734	15	Unit
	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	5.982.000	6	Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.665.000	29.564.000	34	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000	6.714.000	1	Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		<b>178.485.000</b>	<b>154.989.400</b>		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		<b>153.485.000</b>	<b>133.456.174</b>		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	44.600.000	38.974.610	2	Laporan
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9.100.000	6.302.000	1	Laporan
	Reviu Laporan Kinerja	7.000.000	6.851.500	2	Laporan
	Reviu Laporan Keuangan	25.000.000	21.049.750	3	Laporan
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	67.785.000	60.278.314	4	Laporan
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		<b>25.000.000</b>	<b>21.533.226</b>		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15.000.000	13.023.000	1	Laporan
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10.000.000	8.510.226	1	Laporan
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		<b>314.906.000</b>	<b>304.802.188</b>		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	4.000.000	4.000.000	1	Dokumen

	Pengawasan				
	Pendampingan dan Asistensi	<b>310.906.000</b>	<b>300.802.188</b>		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000	2.557.000	1	Laporan
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	71.377.000	66.478.688	3	Laporan
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	225.769.000	222.903.000	5	Laporan
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	10.760.000	8.863.500	1	Laporan

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan untuk alokasi anggaran kegiatan dan program utama (pengawasan) pada tahun anggaran 2021 adalah dilakukannya *refocusing* program dan *refocusing* anggaran sehingga anggaran tepat sasaran.

Tabel 3.21

#### Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	Keterangan
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN		
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	100%	178.485.000	154.989.400	87%	1,15	Efisien
2	Peningkatan pengendalian internal	3,5	3,038	87%					
3	Peningkatan level kapabilitas APIP	3	3	100%	314.906.000	304.802.188	97%	1,03	Efisien
					6.353.999.122	5.148.686.224	81%	1,23	Efisien

Tabel 3.22

#### Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	Keterangan
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.353.999.122</b>	<b>5.148.686.224</b>	<b>81%</b>	1,23	Efisien
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	13.575.000	13.549.000	100%	1,00	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100%	2.000.000	2.000.000	100%	1,00	Impas
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	2.000.000	2.000.000	100%	1,00	Impas
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	2.000.000	1.994.000	100%	1,00	Efisien

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100%	2.000.000	2.000.000	100%	1,00	Impas
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%	2.000.000	2.000.000	100%	1,00	Impas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	100%	3.575.000	3.555.000	99%	1,01	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	<b>5.780.340.122</b>	<b>4.702.217.331</b>	<b>81%</b>	1,23	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100%	5.769.880.122	4.691.888.681	81%	1,23	Efisien
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%	6.460.000	6.417.500	99%	1,01	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%	2.000.000	1.950.150	98%	1,03	Efisien
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%	2.000.000	1.961.000	98%	1,02	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	<b>4.602.000</b>	<b>4.362.900</b>	<b>95%</b>	1,05	Efisien
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2	100%	4.602.000	4.362.900	95%	1,05	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	<b>147.007.000</b>	<b>129.258.124</b>	<b>88%</b>	1,14	Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100%	9.747.000	7.973.000	82%	1,22	Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100%	15.680.000	13.271.375	85%	1,18	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100%	17.724.000	17.116.000	97%	1,04	Efisien
Penyediaan Bahan/Material	12	12	100%	9.452.000	9.275.550	98%	1,02	Efisien
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%	19.080.000	19.072.622	100%	1,00	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	75.324.000	62.549.577	83%	1,20	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100%	<b>203.615.000</b>	<b>169.681.787</b>	<b>83%</b>	1,20	Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%	12.467.000	12.435.900	100%	1,00	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%	121.200.000	87.695.825	72%	1,38	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100%	69.948.000	69.550.062	99%	1,01	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	<b>204.860.000</b>	<b>129.617.082</b>	<b>63%</b>	1,58	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	7	100%	66.425.000	41.895.348	63%	1,59	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel	15	15	100%	91.770.000	45.461.734	50%	2,02	Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	6	100%	6.000.000	5.982.000	100%	1,00	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34	34	100%	29.665.000	29.564.000	100%	1,00	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100%	11.000.000	6.714.000	61%	1,64	Efisien
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100%	100%	100%	<b>178.485.000</b>	<b>154.989.400</b>	<b>87%</b>	1,15	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	100%	100%	<b>153.485.000</b>	<b>133.456.174</b>	<b>87%</b>	1,15	Efisien
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	100%	44.600.000	38.974.610	87%	1,14	Efisien
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	100%	9.100.000	6.302.000	69%	1,44	Efisien
Reviu Laporan Kinerja	2	2	100%	7.000.000	6.851.500	98%	1,02	Efisien
Reviu Laporan Keuangan	3	3	100%	25.000.000	21.049.750	84%	1,19	Efisien
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	4	100%	67.785.000	60.278.314	89%	1,12	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	100%	<b>25.000.000</b>	<b>21.533.226</b>	<b>86%</b>	1,16	Efisien
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	1	100%	15.000.000	13.023.000	87%	1,15	Efisien
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1	1	100%	10.000.000	8.510.226	85%	1,18	Efisien
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100%	100%	100%	<b>314.906.000</b>	<b>304.802.188</b>	<b>97%</b>	1,03	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	100%	100%	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100%</b>	1,00	Impas

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1	1	100%	4.000.000	4.000.000	100%	1,00	Impas
Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	<b>310.906.000</b>	<b>300.802.188</b>	<b>97%</b>	1,03	Efisien
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	100%	3.000.000	2.557.000	85%	1,17	Efisien
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3	3	100%	71.377.000	66.478.688	93%	1,07	Efisien
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	5	100%	225.769.000	222.903.000	99%	1,01	Efisien
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	1	100%	10.760.000	8.863.500	82%	1,21	Efisien

## BAB IV

### Penutup

**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2021 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2021 dengan 3 (empat) sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah” dengan kategori Sangat Baik.
2. Pencapaian sasaran strategis “Peningkatan pengendalian Internal” dengan kategori Tinggi
3. Pencapaian sasaran strategis “Peningkatan Kapabilitas APIP “dengan kategori Sangat Baik.

Permasalahan/Kendala Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2021 antara lain :

- 1) Masih kurangnya komitmen entitas terperiksa untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal.

- 2) Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
- 3) Belum maksimalnya fungsi SPIP di setiap OPD untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing OPD;
- 4) Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS Online);
- 5) Kegiatan pengawasan mandatory yang sering muncul diluar Program kerja pengawasan tahunan yang telah disusun;
- 6) Masih kurangnya jumlah pegawai secara kualitas maupun kuantitas khususnya Auditor di Inspektorat Daerah Kota Magelang.

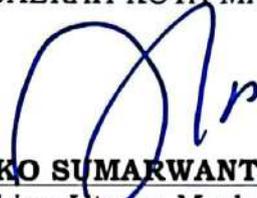
Rekomendasi Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Magelang di masa mendatang antara lain :

- 1) Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan;
- 2) Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap seluruh entitas;
- 3) Melaksanakan peningkatan fungsi satgas SPIP di setiap OPD;
- 4) Penyusunan SOTK berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang lebih jelas sehingga dapat diketahui siapa berbuat apa serta tanggung jawabnya
- 5) Optimalisasi dan pengembangan SIMWAS;
- 6) Penyiapan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan penugasan mandatory;
- 7) Mengusulkan penambahan auditor dan P2UPD melalui jalur perpindahan/penyetaraan ASN serta jalur CPNS;
- 8) Meningkatkan kompetensi APIP melalui Bintek/Diklat yang diselenggarakan oleh Depgadri, BPKP, KPK dan BPK.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Magelang, 19 Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG



**DEDDY EKO SUMARWANTO, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690705 199703 1 007

# *Lampiran*



# PEMERINTAH KOTA MAGELANG

## INSPEKTORAT

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363695 (5lines)  
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 kodmgliA MAGELANG56101  
Website

KEPUTUSAN INSPEKTUR  
NOMOR 050/033/600 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENJABARAN KINERJA  
INSPEKTORAT KOTA MAGELANG  
TAHUN 2019-2021

INSPEKTUR KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama dan penjabaran kinerja pada setiap level manajerial;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Magelang Tahun 2019-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021 Kota Magelang;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

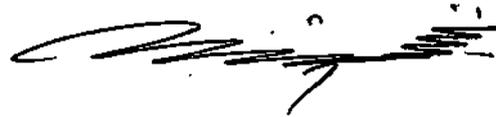
**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENJABARAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2019-2021.**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Penjabaran Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Penjabaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dan Penjabaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 9 Agustus 2019

**INSPEKTUR KOTA MAGELANG**



**SUMARTONO**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR

NOMOR 050/033/600 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENJABARAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENJABARAN KINERJA ESELON III DAN IV  
INSPEKTORAT  
KOTA MAGELANG TAHUN 2019 - 2021

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA OPD

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	5
<b>Tujuan :</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan aparatur yang berkualitas dan profesional					
<b>Sasaran :</b>					
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Opini BPK atas LKPD	Inspektorat	BPK
Peningkatan pengendalian Internal	Peningkatan Pengendalian Internal	Nilai	Nilai Maturitas SPIP	Inspektorat	BPKP
Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Hasil evaluasi Kapabilitas APIP	Inspektorat	BPKP

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS INSPEKTORAT DAN SUBBAGIAN DIBAWAHNYA

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	5
<b>Sekretaris : INSPEKTORAT</b>					
Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Nilai LKJIP SKPD	NILAI	Nilai LKJIP Inspektorat	<b>SEKRETARIS</b>	<i>Program</i> : peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan pemenuhan administrasi perkantoran	2. Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang dapat dipenuhi di bagi jumlah kebutuhan		<i>Program</i> : Pelayanan administrasi perkantoran
	3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kator.	%	Jumlah pengadaan barang di bagi jumlah kebutuhan pengadaan		<i>Program</i> : peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya pelaksanaan RB pada komponen pengukit dan hasil	4. Indek RB	Nilai	Nilai RB		<i>Program</i> : Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengwasan,
<b>SUBBAG. : EVALAP</b>					
Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	1. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	Jumlah rekomendasi BPK yang di tindaklanjuti di bagi jumlah temuan dan rekomendasi BPK	<b>Ka. Subbag EVALAP</b>	<i>Program</i> : : peningkatan system pengwasan internal dan pengendalian

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	5
					pelaksanaan kebijakan KDH <i>Kegiatan</i> :Tindak lanjut hasil pengawasan
	2. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	Jumlah Rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti di bagi jumlah seluruh rekomendasi temuan APIP		Tindak lanjut hasil pengawasan
Meningkatnya pelaksanaan RB pada komponen pengukit dan hasil	3. Indek RB	Nilai	Nilai RB		<i>Program</i> : Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan,
<b>SUBBAG. : PKU (Program, Keuangan dan Umum Kepegawaian).</b>					
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Perkantoran	1. Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang dapat dipenuhi di bagi jumlah kebutuhan	<b>Ka. Subbag PKU</b>	<i>Program</i> : Pelayanan administrasi Perkantoran
	2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor.	%	Jumlah pengadaan barang di bagi jumlah kebutuhan pengadaan		<i>Program</i> : peningkatan sarana dan prasarana aparatur

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	5
Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3. Nilai LKJIP SKPD dengan nilai Baik	NILAI	Nilai LKJIP Inspektorat		<b>Program</b> : peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

### III. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTUR PEMBANTU I,II DAN III.

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	5
<b>BIDANG : IRBAN I,II,III.</b>					
Meningkatnya kualitas pengendalian Intern obyek pemeriksaan	1. Prosentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai PKPT	%	Jumlah pelaksanaan Pemeriksaan entitas berbasis resiko dibagi jumlah entitas dalam PKPT	<b>Ka. Bidang Irbn I,II,dan III</b>	<b>Program</b> : : peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Peningkatan kompetensi sumber daya Aparatur	2. Prosentase aparatur yang mengikuti diklat/workshop substansi	%	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/workshop substansi dibagi jumlah APIP		<b>Program</b> :Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	5
Meningkatkan perangkat daerah yang menerapkan SPIP	3. Persentase Implementasi SPIP di Kota Magelang	%	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP di bagi Jumlah OPD di Kota Magelang		<b>Program</b> : Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal . <b>Keg</b> : Penyelenggaraan Sistem pengendalian internal Pemerintah

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal Agustus 2019

**INSPEKTUR KOTA MAGELANG**



**SUMARTONO**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNADI WIRAWAN  
Jabatan : Plt.INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SIGIT WIDYONINDITO  
Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,  
  
SIGIT WIDYONINDITO

Pihak Pertama,  
  
GUNADI WIRAWAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP
2.	Peningkatan pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3,5
3.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3

Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.906.740.000	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 186.785.000	APBD
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 404.096.000	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 6.497.621.000</b>	

Magelang, 4 Januari 2021

INSPEKTUR KOTA MAGELANG

GUNADI WIRAWAN





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY WALUYOWATI,SE  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : GUNADI WIRAWAN, SH  
Jabatan : Plt.INSPEKTUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,

GUNADI WIRAWAN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620704 199103 1 006

Pihak Pertama,

ENY WALUYOWATI,SE  
Pembina TK.I  
NIP. 19661003 199303 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA : INSPEKTUR PEMBANTU I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100
2	Peningkatan fungsi APIP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100

Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 186.785.000	APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 404.096.000	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 590.881.000</b>	

Magelang, 4 Januari 2021

Plt.INSPEKTUR



GUNADI WIRAWAN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620704 199103 1 006

INSPEKTUR PEMBANTU I



ENY WALUYOWATI, SE  
Pembina TK.I  
NIP. 19661003 199303 2 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL PRIYOWATORO, S.E., M.Si.  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : GUNADI WIRAWAN, SH  
Jabatan : Plt.INSPEKTUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,

GUNADI WIRAWAN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620704 199103 1 006

Pihak Pertama,

DANIEL PRIYOWATORO, SE.,MSi.  
Pembina Tk I  
NIP. 19710208 199803 1 010

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTORAT KOTA MAGELANG

UNIT KERJA : INSPEKTUR PEMBANTU II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100
2	Peningkatan fungsi APIP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100

Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 186.785.000	APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 404.096.000	APBD
JUMLAH	Rp 590.881.000	

Magelang, 4 Januari 2021

Plt.INSPEKTUR



GUNADI WIRAWAN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620704 199103 1 006

INSPEKTUR PEMBANTU II



DANIEL PRIOWATORO, SE., MSi.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19710208 199803 1 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI FATONAH, SE.MT  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU III

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : GUNADI WIRAWAN, SH  
Jabatan : Plt.INSPEKTUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUNADI WIRAWAN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620704 199103 1 006

SITI FATONAH, SE.MT  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660821 199403 2 005

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTORAT KOTA MAGELANG

UNIT KERJA : INSPEKTUR PEMBANTU III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100
2	Peningkatan fungsi APIP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100

Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 186.785.000	APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 404.096.000	APBD
JUMLAH	Rp 590.881.000	

Magelang, 4 Januari 2021

Plt.INSPEKTUR



GUNADI WIRAWAN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620704 199103 1 006

INSPEKTUR PEMBANTU III



SITI FATONAH, SE.MT  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660821 199403 2 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDHI HARYANI, SH.M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : GUNADI WIRAWAN, SH  
Jabatan : Plt.INSPEKTUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,

GUNADI WIRAWAN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620704 199103 1 006

Pihak Pertama,

WIDHI HARYANI, SH.M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690729 199503 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA : SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	%	100
2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100
3	Peningkatan fungsi APIP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100

Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.906.740.000	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 186.785.000	APBD
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 404.096.000	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 6.497.621.000</b>	

Magelang, 4 Januari 2021

Plt.INSPEKTUR



GUNADI WIRAWAN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620704 199103 1 006

SEKRETARIS



WIDHI HARYANI, SH.M.SI  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690729 199503 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH SRI PALUPI,SH.M.AP  
Jabatan : Ka. Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIDHI HARYANI,SH.M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,

WIDHI HARYANI,SH.M.Si  
Pembina TK.I  
NIP. 19661003 199303 2 007

Pihak Pertama,

INDAH SRI PALUPI,SH.M.AP  
Pembina  
NIP. 19730813 199803 2 005

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTORAT KOTA MAGELANG

UNIT KERJA : ESELON IV (Kasub Bag. EVALAP)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	100
2		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100
3	Meningkatnya pelaksanaan RB pada komponen pengukit dan hasil	Indeks RB	NILAI	66

Kegiatan :	Anggaran :	Keterangan
1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 161.785.000	APBD
2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 25.000.000	APBD
3 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 4.000.000	APBD
4 Pendampingan dan Asistensi	Rp 400.096.000	APBD
<b>JUMLAH</b>	<u>Rp 590.881.000</u>	

SEKRETARIS



WIDHI HARYANI, SH.M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19661003 199303 2 007

Magelang, 4 Januari 2021  
KASUB BAG EVALAP



INDAH SRI PALUPI, SH.M.AP

Pembina

NIP. 19730813 199803 2 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN SEPTINA ANGGARSARI, SE., M.Ec.Dev  
Jabatan : Ka. Sub Bag Program, Keuangan dan Umum Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIDHI HARYANI, SH.M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,

WIDHI HARYANI, SH.M.Si  
Pembina TK.I  
NIP. 19661003 199303 2 007

Pihak Pertama,

DIAN SEPTINA A., SE., M.Ec.Dev  
Penata  
NIP.19610910 198503 1 007

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTORAT KOTA MAGELANG

UNIT KERJA : ESELON IV (Kasub Bag. Program, Keuangan dan Umum Kepegawaian)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Perkantoran	Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100
2		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kator.	%	100
3	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Kegiatan :	Anggaran :	Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.000.000	APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.509.700.000	APBD
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 4.602.000	APBD
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 171.207.000	APBD
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 184.928.000	APBD
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 179.195.000	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 5.061.632.000</b>	

Magelang, 4 Januari 2021

SEKRETARIS



WIDHI HARYANI, SH.M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19661003 199303 2 007

KASUB.BAG PKU



DIAN SEPTINA A, SE., M.Ec.Dev

Penata

NIP. 19610910 198503 1 007



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDDY EKO SUMARWANTO  
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ  
Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

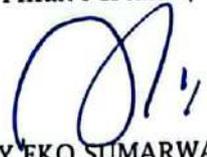
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 26 November 2021

Pihak Kedua,  
  
MUCHAMAD NUR AZIZ

Pihak Pertama,  
  
DEDDY EKO SUMARWANTO

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP
2.	Peningkatan pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3,5
3.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3

Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.353.999.122	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 178.485.000	APBD
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 314.906.000	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 6.847.390.122</b>	



Magelang, November 2021  
INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG  
  
DEDDY EKO SUMARWANTO



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY WALUYOWATI,SE  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2021

Pihak Kedua,

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

Pihak Pertama,

ENY WALUYOWATI, SE  
Pembina Tk.I  
NIP. 19661003 199303 2 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA : INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100
2	Peningkatan fungsi APIP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100

Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 51.600.000	APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 3.000.000	APBD
JUMLAH	Rp 54.600.000	

Magelang, November 2021

INSPEKTUR DAERAH



DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMDA



ENY WALUYOWATI, SE  
Pembina Tk I  
NIP. 19661003 199303 2 007



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. E. HENY ASMORO, M.Si.  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN DAN KINERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2021

Pihak Kedua,

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

Pihak Pertama,

Drs. E. HENY ASMORO, M.Si.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19671203 199203 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

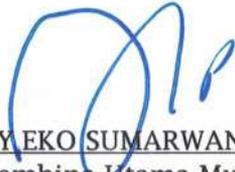
UNIT KERJA : INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN  
DAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100

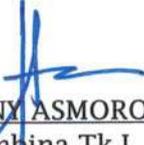
Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 34.100.000	APBD
JUMLAH	Rp 34.100.000	

Magelang, November 2021

INSPEKTUR DAERAH

  
DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN  
AKUNTABILITAS KEU DAN KINERJA

  
Drs. E. HENY ASMORO, M.Si.  
Pembina Tk I  
NIP. 19671203 199203 1 007



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI FATONAH, SE.MT  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN REFORMASI  
BIROKRASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2021

Pihak Kedua,

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

Pihak Pertama,

SITI FATONAH, SE.MT  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660821 199403 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA : INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Peningkatan fungsi APIP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100

	Program :	Anggaran :	Keterangan
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 307.906.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	Rp 307.906.000	

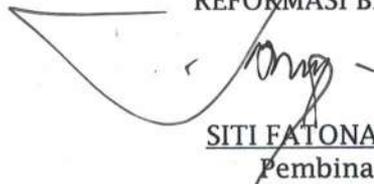
Magelang, November 2021

INSPEKTUR DAERAH



DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN  
REFORMASI BIROKRASI



SITI FATONAH, SE.MT  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660821 199403 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

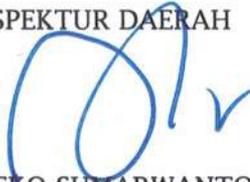
UNIT KERJA : INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN KHUSUS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100

Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 25.000.000	APBD
JUMLAH	Rp 25.000.000	

Magelang, November 2021

INSPEKTUR DAERAH



DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

INSPEKTUR PEMBANTU  
PENGAWASAN KHUSUS



DANIEL PRIYOWATORO, SE.,MSi.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19710208 199803 1 010



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL PRIYOWATORO, S.E., M.Si.  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN KHUSUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2021

Pihak Kedua,

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

Pihak Pertama,

DANIEL PRIYOWATORO, SE., MSi.  
Pembina Tk I  
NIP. 19710208 199803 1 010



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDHI HARYANI,SH.M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2021

Pihak Kedua,

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

Pihak Pertama,

WIDHI HARYANI,SH.M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690729 199503 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA : SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	%	100
2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100
3	Peningkatan fungsi APIP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100

Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.353.999.122	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 67.785.000	APBD
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 4.000.000	APBD
JUMLAH	Rp 6.425.784.122	

Magelang, November 2021

INSPEKTUR DAERAH



DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

SEKRETARIS



WIDHI HARYANI, SH.M.SI  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690729 199503 2 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN SEPTINA ANGGARSARI, SE., M.Ec.Dev  
Jabatan : Ka. Sub Bag Program, Keuangan dan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIDHI HARYANI, SH.M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2021

Pihak Kedua,

WIDHI HARYANI, SH.M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19661003 199303 2 007

Pihak Pertama,

DIAN SEPTINA A, SE., M.Ec.Dev

Penata

NIP.19610910 198503 1 007

# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA : ESELON IV (Kasub Bag. Program, Keuangan dan Umum)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Perkantoran	Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100
2		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kator.	%	100
3	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Kegiatan :	Anggaran :	Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13.575.000	APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.780.340.122	APBD
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 4.602.000	APBD
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 147.007.000	APBD
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 203.615.000	APBD
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 204.860.000	APBD
JUMLAH	Rp 6.353.999.122	

Magelang, November 2021

SEKRETARIS



WIDHI HARYANI, SH.M.Si  
Pembina TK.I  
NIP. 19661003 199303 2 007

KASUB.BAG PKU



DIAN SEPTINA A, SE., M.Ec.Dev  
Penata  
NIP. 19610910 198503 1 007



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH SRI PALUPI,SH.M.AP  
Jabatan : Ka. Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIDHI HARYANI,SH.M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2021

Pihak Kedua,

WIDHI HARYANI,SH.M.Si  
Pembina TK.I

NIP. 19661003 199303 2 007

Pihak Pertama,

INDAH SRI PALUPI,SH.M.AP  
Pembina

NIP. 19730813 199803 2 005

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA : ESELON IV (Kasub Bag. Evaluasi dan Pelaporan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1	Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	88
2		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	95

Kegiatan :	Anggaran :	Keterangan
1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 67.785.000	APBD
2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 4.000.000	APBD
<b>JUMLAH</b>	<hr/> Rp 71.785.000	

SEKRETARIS



WIDHI HARYANI, SH.M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19661003 199303 2 007

Magelang, November 2021

KASUB.BAG EVALAP



INDAH SRI PALUPI, SH.M.AP

Pembina

NIP. 19730813 199803 2 005

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4	
1									
2									
3									
<p><b>Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b></p>									
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	INSPEKTUR
2	Peningkatan Pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	NILAI	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	INSPEKTUR
3	Peningkatan Level Kapabilitas APJP	Level Kapabilitas APJP	Level	3	3	3	3	3	INSPEKTUR

Megetahui,

Pt.INSPEKTUR



GUNADI WIRAWAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620704 199103 1 006

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>									
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	INSPEKTUR DAERAH
2	Peningkatan Pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	NILAI	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	INSPEKTUR DAERAH
3	Peningkatan Level Kapabilitas APiP	Level Kapabilitas APiP	Level	3	3	3	3	3	INSPEKTUR DAERAH

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH



DEDDY EKO SUMARWANTO, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19690705 199703 1 007

## RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat									
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	25	50	75	100	IRBANWAS PENYELENGGARAAN PEMDA
2	Peningkatan fungsi APJP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100	25	50	75	100	IRBANWAS PENYELENGGARAAN PEMDA

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH

  
DEDDY EKO SUMARWANTO, ST

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMDA

  
ENY WALUYOWATI, SE

Pembina TK. I  
NIP. 19661003 199303 2 007

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	25	50	75	100	IRBANWAS AKK

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH



DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690705 199703 1 007

INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN  
 AKUNTABILITAS KEU DAN KINERJA



Drs. E. HENY ASMORO, M.Si.  
 Pembina Tk I  
 NIP. 19671203 199203 1 007

## RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

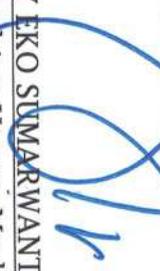
UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan fungsi APJP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100	25	50	75	100	IRBANWAS REFORMASI BIROKRASI

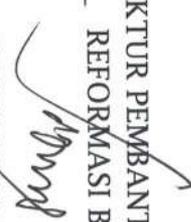
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparaturnya yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH

  
DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN  
REFORMASI BIROKRASI

  
SITI FATONAH, SE.MT  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660821 199403 2 005

# RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

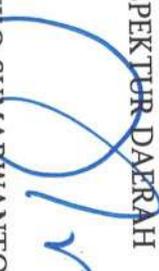
## INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

### UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN KHUSUS

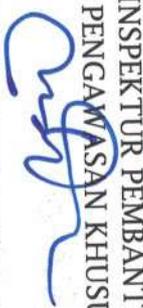
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	25	50	75	100	IRBAN PENGAWASAN KHUSUS

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH  


DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690705 199703 1 007

INSPEKTUR PEMBANTU  
 PENGAWASAN KHUSUS  


DANIEL PRIYOWATORO, SE, MSI  
 Pembina Tk I  
 NIP. 19710208 199803 1 010

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat									
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	%	100	25	50	75	100	SEKRETARIS
2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	25	50	75	100	SEKRETARIS
3	Peningkatan fungsi APJP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100	25	50	75	100	SEKRETARIS

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH

SEKRETARIS

  
DEDDY EKO SUMARWANTO, ST

  
WIDHI HARYANI, SH.M.SI

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690705 199703 1 007

Pembina Tk.I  
 NIP. 19690729 199503 2 002

# RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

## INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA: SUB. BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM KEPEGAWAIAN (PKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat									
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	25	50	75	100	KASUB.BAG . PKU
2		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kator.	%	100	25	50	75	100	KASUB.BAG . PKU
3	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	KASUB.BAG . PKU

Megetahui,

SEKRETARIS



WIDHI HARYANI, SH.M.SI

Pembina Tk.I

NIP. 19690729 199503 2 002

KA.SUB.BAG .PKU



DIAN SEPTINA A. SE., M.Ec.Dev

Penata

NIP. 19610910 198503 1 007

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: SUB. BAG. EVALAP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat									
1	Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	88	20	40	60	88	KASUB.BAG. EVALAP
2		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APPP	%	95	25	50	75	95	KASUB.BAG. EVALAP

Megetahui,

SEKRETARIS



WIDHI HARYANI, SH.M.SI

Pembina Tk.I

NIP. 19690729 199503 2 002

KA.SUB.BAG. EVALAP



INDAH SRI PALUPI, SH.M.AP

Pembina

NIP. 19730813 199803 2 005

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>									
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	INSPEKTUR DAERAH
2	Peningkatan Pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	NILAI	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	INSPEKTUR DAERAH
3	Peningkatan Level Kapabilitas APiP	Level Kapabilitas APiP	Level	3	3	3	3	3	INSPEKTUR DAERAH

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH

  
DEDDY EKO SUMARWANTO, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19690705 199703 1 007

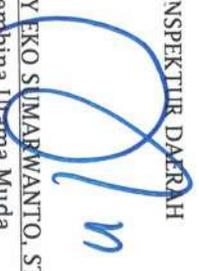
**MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	%										
1																	
2																	
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	INSPEKTUR DAERAH
2	Peningkatan Pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	NILAI	3,5	3,5	3,08	88	3,5	3,08	88	3,5	3,08	88	3,5	3,08	88	INSPEKTUR DAERAH
3	Peningkatan Level Kapabilitas APP	Level Kapabilitas APiP	Level	3	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	INSPEKTUR DAERAH

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap penentuan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Mengetahui,

INSPEKTUR DAERAH



DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

**MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan 1		Tri Wulan 2		Tri Wulan 3		Tri Wulan 4		Penanggung Jawab				
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1																	
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar tercapainya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat																	
1	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	100	100	100	IRBANWAS PENYELENGGARAAN PEMDA
2	Peningkatan fungsi APJP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	100	100	100	IRBANWAS PENYELENGGARAAN PEMDA

Megetahui,

INSPEKTOR DAERAH



DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690705 199703 1 007

INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN  
 PENYELENGGARAAN PEMDA



ENY WALUYOWATI, SE  
 Pembina TK.1  
 NIP. 19661003 199303 2 007

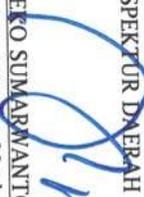
**MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan 1		Tri Wulan 2		Tri Wulan 3		Tri Wulan 4		Penanggung Jawab			
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	Meningkatkan kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	100	100	IRBANWAS AKK

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat.

Megetahui,

  
**INSPEKTUR DAERAH**  
**DEDDY EKO SUMARMANTO, ST**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690705 199703 1 007

  
**INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN**  
**AKUNTABILITAS KEU DAN KINERJA**  
**Drs. E. HENY ASMORO, M.Si**  
 Pembina Tk I  
 NIP. 19671203 199203 1 007

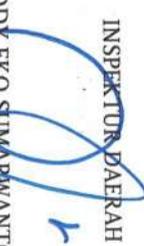
**MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan 1		Tri Wulan 2		Tri Wulan 3		Tri Wulan 4		Penanggung Jawab				
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1																	
2	Peningkatan fungsi APJP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	100	100	100	IRBANWAS REFORMASI BIROKRASI

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Megetahui,

  
**INSPEKTUR DAERAH**  
**DEDDY EKO SUMARWANTO, ST**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690705 199703 1 007

  
**INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN**  
**REFORMASI BIROKRASI**  
**SITI FATONAH, SE, MT**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19660821 199403 2 005

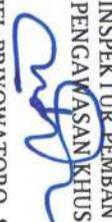
**MONEY RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN KHUSUS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan 1		Tri Wulan 2		Tri Wulan 3		Tri Wulan 4		Penanggung Jawab				
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	100	100	100	IRBAN PENGAWASAN KHUSUS

Megetahui,

  
INSPEKTUR DAERAH  
DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

  
INSPEKTUR PEMBANTU  
PENGAWASAN KHUSUS  
DANIEL PRIYOWATORO, SE., MSI.  
Pembina Tk I  
NIP. 19710208 199803 1 010

**MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	
					Target	Realisasi	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<p>Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>																		
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	100	100	100	100	SEKRETARIS
2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	100	100	100	100	SEKRETARIS
3	Peningkatan fungsi APiP sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i>	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	100	100	100	100	SEKRETARIS

Megetahui,

INSPEKTOR DAERAH

  
DEDDY EKO SUMARWANTO, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690705 199703 1 007

SEKRETARIS

  
WIDHI HARYANI, SH, M, SI  
Pembina TK.I  
NIP. 19690729 199503 2 002

**MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: SUB. BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM KEPEGAWAIAN (PKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri Wulan 1			Tri Wulan 2			Tri Wulan 3			Tri Wulan 4			Penanggung Jawab	
					Target	Realisasi	%											
1																		
2																		
3																		
1	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	100	100	100	100	KASUB.BAG. PKU
2		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kator.	%	100	25	25	100	50	50	100	75	75	100	100	100	100	100	KASUB.BAG. PKU
3	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100	KASUB.BAG. PKU									

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Megetahui,  
SEKRETARIS

  
WIDHI HARYANI, SH.M.SI  
Pembina Tk.I

NIP. 19690729 199503 2 002

KA.SUB.BAG. PKU

  
DIAN SEPTINA A. SE., M.Ec.Dev  
Penata

NIP. 19610910 198503 1 007

**MONEV RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: SUB. BAG. EVALAP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Tri Wulan 1		Tri Wulan 2		Tri Wulan 3		Tri Wulan 4		Penangung Jawab				
				Tahunan	Tertentu	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat																	
1	Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal dan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	88	20	94,96	100	40	91,04	100	60	91,04	100	88	95,06	100		KASUB.BAG. EVALAP
2		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APP	%	95	25	25	100	50	50	100	75	75	100	95	100	100		KASUB.BAG. EVALAP

Megetahui,  
SEKRETARIS

  
WIDHI HARYANI, S.H., M.SI

Pembina Tk.I  
NIP. 19690729 199503 2 002

KA.SUB.BAG. EVALAP

  
INDAH SRI PALUPI, S.H., M.AP

Pembina  
NIP. 19730813 199803 2 005